

# Bahasa Sebagai Simbolisasi Mempertahankan Kekuasaan

**Nur Sofyan**

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP Angkatan VI

Email : sovian\_20070530125@yahoo.com

## **Abstract**

*The language has an important role in a power. The relation of language and power had existed centuries ago. Language not only reflects the social status, but more than that. The language is used as the symbol of maintaining power. World leaders use the speech as a tool to legitimize power. This is apparent from the order of the sentences and the way they played a series of issues in his speech. As it was done by President, State leaders or a King. Power requires its own way to maintain legitimacy. So the language is viewed can be used as a tool and a symbol of maintaining power. In Javanese language used as a means to differentiate the social classes among the nobility and common people. Blatantly disrespectful language should only be used by those who are included on the nobility. As for the political scene and domination, the language used by President Bush in an effort justification of effort in Kuwait attack upon himself and his allies. While President Susilo Bambang Yudhoyono used a speech to the language to clarify the truth of the case of Century Bank. This was done as an attempt to preserve his power by giving information about the sat question. This article truly wanted to give an explanation on the application form of the language as a symbol of the mass and retain power. Through a series of speeches a leader can play a social issue. At the end of this article the author created to provide shared understanding that the potential of the language and symbols of power have been known to the authorities in maintaining his rule until this time.*

**Keywords :** language, symbol, power

## **Abstraksi :**

*Bahasa memiliki peranan penting dalam sebuah kekuasaan. Relasi bahasa dan kekuasaan telah ada berabad yang lalu. Bahasa tidak hanya mencerminkan status sosial belaka, tetapi lebih dari itu, bahasa digunakan sebagai simbol mempertahankan kekuasaan. Para pemimpin dunia menggunakan pidato sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Hal ini terlihat dari susunan kalimat dan cara mereka memainkan isu dalam serangkaian pidatonya. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh presiden, pemimpin negara ataupun seorang raja. Kekuasaan membutuhkan cara tersendiri untuk mempertahankan legitimasinya. Sehingga bahasa dipandang dapat digunakan sebagai alat sekaligus simbol mempertahankan kekuasaan. Bahasa dalam suku Jawa digunakan sebagai sarana untuk membedakan kelas sosial antara kaum bangsawan dengan rakyat biasa. Nampak jelas bahasa sopan hanya boleh digunakan oleh mereka yang termasuk pada kaum bangsawan. Adapun didalam percaturan politik dan dominasi kekuasaan, bahasa digunakan oleh Presiden Bush dalam upaya pembenaran atas upaya penyerangan di Kuwait atas dirinya dan sekutunya. Sedangkan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan bahasa pidatonya untuk mengklarifikasi kebenaran kasus Bank Century. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaannya dengan memberikan informasi tentang duduk persoalan yang sesungguhnya. Artikel ini sesungguhnya ingin memberikan penjelasan mengenai bentuk aplikasi bahasa sebagai simbol mempertahankan kekuasaan pada massa lalu. Melalui serangkaian pidato seorang pemimpin bisa memainkan sebuah isu sosial. Pada akhirnya artikel ini penulis buat untuk memberikan pemahaman bersama bahwa potensi bahasa dan simbol kekuasaan telah diketahui para penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya sampai detik ini.*

*Kata kunci: bahasa, simbol, kekuasaan.*

## Pendahuluan

Sebagaimana kekuasaan di masa lalu, bahasa menjadi bagian penting dalam membedakan dominasi kekuasaan. Dominasi kekuasaan ini nampak pada penggunaan bahasa tertentu dalam mengukuhkan status kekuasaan atas bangsa atau penguasa dalam lingkup sosial. Sehingga terjadi pembentukan persepsi mengenai penggunaan bahasa sebagai simbol pembeda kekuasaan dalam lingkup kehidupan sosial. Hal ini dilakukan untuk membedakan kekuasaan kaum bangsawan/kaum intelektual dengan masyarakat biasa. Bahasa bukan sekedar sebagai alat perekat komunikasi, namun lebih dari itu, yaitu sebagai alat melegitimasi kekuasaan. Bahasa mampu menjadi alat efektif dalam pembentukan kekuasaan, utamanya digunakan dalam menandai dominasi kaum dominan di dalam kekuasaan.

Sejarah mengenai penggunaan bahasa sebagai alat untuk menandai kekuasaan salah satunya dapat diruntut dari penggunaan bahasa sopan dalam suku Jawa. Penggunaan bahasa sopan menegaskan dominasi kaum bangsawan terhadap rakyat jelata dapat dilihat dari catatan-catatan yang disampaikan oleh Thomas Stamford Raffles dalam bukunya *The History of Java*. Ia mengatakan bahwa:

“Tidak ada gambaran dalam bahasa yang lebih pantas untuk dilihat, daripada perbedaan dialeg, atau perbedaan antara bahasa sehari-hari, dan apa yang disebut sebagai bahasa sopan atau bahasa kehormatan. Batas yang digariskan dalam bahasa Jawa sangat jelas, antara kelas sosial yang tinggi dan yang rendah, yang tidak ada catatan untuk siapapun, dari golongan apapun, diizinkan untuk berbicara dengan atasannya dalam bahasa daerah atau bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari tersebut digunakan oleh orang-orang yang lebih rendah dan tidak berpendidikan, dimana kelas masyarakat yang lebih tinggi tidak mengenalnya.” (Raffles, 2008: 259).

Pernyataan yang dituliskan oleh Thomas Stamford Raffles memberikan pemahaman mengenai penggunaan bahasa sopan dalam struktur dialektika dalam suku Jawa. Bahasa sopan digunakan oleh kaum yang mempunyai status sosial yang tinggi dalam masyarakat. Bahasa sopan menandakan perbedaan struktur kelas sosial, antara kaum bangsawan dengan kelas rendah. Bahasa sopan digunakan oleh kaum rendah dalam komunikasinya dengan kaum bangsawan. Bahkan kata-kata “tidak ada catatan untuk siapapun, dari

golongan apapun, diizinkan untuk berbicara dengan atasannya dalam bahasa daerah atau sehari-hari”. Ini menandakan ada aturan kebahasaan yang mewajibkan bagi kaum biasa untuk menggunakan bahasa sopan ketika berkomunikasi dengan atasannya utamanya dengan kaum bangsawan. Bahasa sehari-hari dalam tatanan suku Jawa hanya boleh digunakan bagi orang-orang yang lebih rendah dan tidak berpendidikan.

Perihal penggunaan bahasa sopan di atas menandakan konstruksi dan dominasi atas kaum bangsawan terhadap kaum biasa di dalam suku Jawa. Rakyat biasa dan tidak berpendidikan tidak diperkenankan menggunakan bahasa sehari-hari dalam berkomunikasi dengan atasannya sebagai kaum bangsawan. Sehingga bahasa dalam pandangan ini digunakan untuk mengukuhkan kedudukan seseorang dalam strata sosial. Sehingga tampak sang penguasa yang didominasi kaum bangsawan dalam struktur sosial suku Jawa.

Penggunaan bahasa sebagai simbol mempertahankan kekuasaan menandakan bahwa bahasa adalah modal sosial yang menentukan kapasitas seseorang dalam ranah kehidupan sosial. Sebagaimana ilustrasi yang digambarkan oleh Thomas Stamford Raffles tersebut, penggunaan bahasa sebagai cara untuk memperoleh keuntungan politik, sosial, ekonomi juga digunakan para penganut Mazhab Sofisme. Hal ini sesuai dengan penjelasan mengenai penggunaan bahasa sebagai modal sosial kekuasaan oleh penganut mazhab tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Muridan S. Widjojo dan Mashudi Noorsalim dalam bukunya “Bahasa Negara Versus Bahasa Gerakan Mahasiswa”. Kedua penulis ini mengemukakan bahwa:

“Secara historis, keberadaan bahasa sebagai alat untuk mempengaruhi seseorang/kelompok telah muncul sejak jaman Yunani (5 abad sebelum masehi). Mazhab Sofisme telah memanfaatkan bahasa sebagai cara untuk memperoleh keuntungan sosial, politik dan ekonomi. Pada saat itu muncul kesadaran bahwa kepandaian berbahasa dapat dipandang sebagai modal sosial seseorang untuk menentukan status sosialnya dalam masyarakat. Semakin tinggi kemampuan berbahasa seseorang semakin tinggi penghargaan masyarakat terhadapnya. Kemampuan bahasa disamakan dengan kemampuan intelektual seseorang, pada akhirnya berpengaruh besar pada kekuasaan yang akan dimilikinya” (Widjojo & Noorsalim, 2004: 2).

Pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwa dalam struktur penduduk suku Jawa maupun

penganut mazhab Soffisme telah menggunakan bahasa sebagai simbol atau tanda kekuasaan. Hal ini didasarkan pada fakta di penggunaan bahasa sopan atas, bahasa sopan dalam suku Jawa dikonstruksikan untuk mengukuhkan kekuasaannya sebagai kaum bangsawan yang mempunyai kekuasaan dan tingkat pendidikan yang baik. Sehingga masyarakat tidak diperkenankan menggunakan bahasa sehari-hari dalam melakukan komunikasi dengan kaum bangsawan. Selain membedakan dari faktor pendidikan yang berpengaruh pada status sosial. Bahasa sopan menggambarkan tingkat kekuasaan, kebangsawanan, dan tingkat pendidikan yang tinggi pada suku Jawa.

Sedangkan tinjauan Mazhab Soffisme tersebut memberikan pemahaman bahwa kesadaran untuk menggunakan bahasa sebagai tujuan kekuasaan adalah tujuan dari mazhab ini. Setidaknya penganut paham ini menyadari bahwa bahasa adalah modal sosial yang akan menentukan kekuasaan mereka baik dalam segi ekonomi, sosial ataupun politik. Sehingga konstruksi sosial yang diinginkan adalah penghargaan atas status sosial dalam sebuah relasi sosial atau kekuasaan dalam ranah sosial.

## Pembahasan

### Bahasa dan Simbol Kekuasaan

Setelah mengetahui sejarah penggunaan bahasa dalam konstruksi kekuasaan masa lalu. Pada bagian kedua peneliti ingin sampaikan kaitan bahasa dan simbol kekuasaan. Melalui pemahaman terhadap bahasa dan simbol kekuasaan diharapkan mampu melihat kekuasaan simbolik bahasa pada tatanan praktis pada bagian berikutnya. Kajian ini diharapkan mampu menjadi petunjuk untuk menjelaskan logika bahasa sebagai simbol kekuasaan. Utamanya fungsi kerja bahasa dalam konteks mempertahankan kekuasaan.

Sebagaimana pokok bahasan tersebut, peneliti paparkan mengenai bahasa dan simbol kekuasaan oleh Muridan S. Widjojo dalam bukunya “Bahasa Negara versus Bahasa Gerakan Mahasiswa” yang mengutip pernyataan Pierre Bourdieu sebagai berikut:

“Pierre Bourdieu memandang bahwa kekuasaan merupakan tujuan utama dalam setiap relasi sosial. Setiap relasi sosial, selalu terdapat pertarungan-pertarungan yang tujuan akhirnya adalah memperoleh kekuasaan. Dalam konteks relasi sosial, bahasa memiliki sifat *language arbitrariness*, yaitu tidak adanya persamaan antara aturan gramatikal dengan maknanya, namun yang lebih penting adalah tujuan dari makna tersebut. Dalam

konteks ini, bahasa lebih menunjukkan kekuasaan simbolik. Dalam buku *Language and Symbolic Power*, Bourdieu menyatakan bahwa kekuasaan simbolik merupakan suatu kekuasaan untuk mengkonstruksi realitas melalui apa yang disebut dengan tatanan *genoseological*, yaitu pemaknaan yang paling dekat mengenai dunia sosial suatu kelompok/orang. Disini, simbol-simbol dipandang sebagai instrumen pengetahuan dan komunikasi yang memungkinkan terciptanya suatu konsensus mengenai makna dan dunia sosial. Tentunya, hal ini dilakukan dengan melakukan pemaksaan terhadap kelas subdominan, yang secara fundamental akan memberi kontribusi bagi terciptanya reproduksi tatanan sosial yang diinginkan oleh suatu kelas yang dominan” (dalam Widjojo & Noorsalim, 2004: 11).

Definisi di atas memberikan pemahaman akan penggunaan bahasa sebagai simbol sekaligus cara untuk menuju satu kekuasaan. Ini merupakan satu fakta bahwa di dalam setiap sistem sosial atau relasi sosial terdapat tujuan tertentu yaitu kekuasaan. Di setiap relasi itulah juga memungkinkan terjadinya pertarungan-pertarungan yang tidak lain adalah untuk mendapatkan hal tersebut. Bahasa dalam konteks relasi sosial tidak memandang kesamaan antara aturan dengan aturan main penggunaan bahasa tersebut. Menjadi hal yang penting dalam konteks ini adalah tujuan dan makna penggunaan bahasa yang lebih menunjukkan kekuasaan simbolik.

Kekuasaan simbolik atas penggunaan bahasa merupakan bentuk kekuasaan untuk mengkonstruksi realitas melalui pemaknaan yang paling dekat dengan kehidupan sosial/kelompok atau seseorang. Perspektif ini lebih menekankan bahwa bahasa tidak hanya sebagai cara komunikasi dalam dunia sosial. Namun lebih dari itu bahasa dapat digunakan untuk mengkonstruksi realitas melalui pemaknaan dunia sosial. Fenomena ini dapat dilihat dari konstruksi atas bahasa sopan yang dikonstruksikan oleh para bangsawan dalam suku Jawa. Pemaknaan atas lingkup kehidupan sosial yang masih lekat dengan kehidupan kerajaan. Kehidupan yang mengenal struktur sosial dalam tata kehidupan dan relasi sosial, misalnya golongan masyarakat biasa, bangsawan, atau dalam konteks Jawa dikatakan sebagai *priayi*. Tujuan dari konstruksi tidak lain untuk mengukuhkan pengakuan atas kaum bangsawan yang mempunyai tingkat pendidikan yang baik dan kekuasaan atas bawahannya.

Jika dicermati, pemaksaan terhadap kaum sub-

ordinat pada masa itu, bahwa kaum dominan (bangsawan) tidak mengizinkan kaum subordinat berkomunikasi dengan atasan dengan bahasa sehari-hari. Ini menandakan bahwa pemaksaan terhadap kaum subordinat secara fundamental memberikan kontribusi bagi terciptanya reproduksi tatanan sosial yang diinginkan. Utamanya adalah reproduksi tatanan sosial yang diinginkan kaum bangsawan suku Jawa melalui penggunaan bahasa sopan dalam membedakan status sosial dan kekuasaan.

Peran bahasa dalam konstruksi pengakuan kedudukan dan kehormatan tersebut memberikan pemahaman bagi peneliti mengenai ungkapan Pierre Bourdieu yang disampaikan oleh Richard Jenkins dalam bukunya yang berjudul "Membaca pikiran Pierre Bourdieu". Jenkins memaparkan pemikiran Bourdieu yang memberikan pemahaman mengenai kebudayaan, status dan kehormatan dan manfaat bahasa. Ia mengatakan bahwa:

"Status sosial meliputi praksis yang menekankan dan menunjukkan kehormatan dan perbedaan budaya yang merupakan ciri krusial dari semua stratifikasi sosial. Status bisa saja dikonsepsikan sebagai gaya hidup, yaitu sebagai totalitas praktik kultural seperti pakaian, turunan dan watak badani. Sementara status berkaitan dengan penghargaan politis dan lokasi legal di dalam masyarakat sipil. Status juga termasuk dalam beberapa aspek, merupakan suatu gaya" ( dalam Richard Jenkins, 2010: 198).

Pernyataan di atas jika dihubungkan dengan contoh penggunaan bahasa sopan dalam suku Jawa dan pandangan mengenai bahasa dan kekuasaan simbolis maka dapat ditarik garis merah. Status sosial ditunjukkan melalui konstruksi bahasa yang menunjukkan kehormatan dan perbedaan karakter pemikiran yang merupakan ciri krusial dari stratifikasi sosial. Kehormatan dalam tatanan suku Jawa dikonstruksikan melalui penggunaan kebahasaan, yaitu bahasa sopan. Kehormatan dikonstruksikan oleh para bangsawan dalam membedakan legitimasi dan pengaruh atas kekuasaan. Ini menandakan adanya status yang dikonsepsikan melalui bahasa sopan pada kaum bangsawan atas kaum jelata pada suku Jawa. Status menurut peneliti merupakan penghargaan secara politis, misalnya dalam lingkup kerajaan suku Jawa. Adapun relasi antara penghargaan politik dan letak posisi legal dalam masyarakat ditandai dengan politik kebahasaan sebagai simbol kekuasaan.

Pemanfaatan bahasa sebagai simbol memper-

tahankan kekuasaan dapat dilihat dari penggunaan bahasa oleh para aktor pemegang kekuasaan dalam mengendalikan jalannya kekuasaan. Tidak hanya itu bahasa mampu dijadikan alat untuk mengalihkan isu-isu yang bisa membahayakan penguasa. Hal ini dapat dilihat dari cara politisi dalam membenarkan keputusan terhadap suatu kebijakan yang telah diambil. Sekalipun hal tersebut adalah hal yang kontroversial dikalangan publik yang terdominasi, pembenaran atas kasus tertentu dapat dilakukan melalui bahasa.

Bahasa sebagai pengendali pikiran dan kesopanan politik setidaknya menjadi sebuah kajian yang patut di pelajari. Hal ini sebagai bagian dari penggunaan bahasa dalam tataran kekuasaan, terutama sebagai simbol mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana pendapat George Orwell yang dipaparkan oleh Linda Thomas & Shan Wareing dalam bukunya yang berjudul "Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan" Ia mengatakan bahwa:

"Bahasa politik sebagian besar terdiri dari eufimisme, pendapat-pendapat yang patut dipertanyakan dan ungkapan-ungkapan yang tidak jelas. Bahasa dari kalangan politik dan ini mencakup semua partai politik mulai dari kaum Konservatif sampai Anarkis dirancang untuk membuat dusta kedengarannya benar dan membuat pembunuhan kedengarannya mulia, serta membuat omong kosong kedengarannya meyakinkan" (dalam Thomas & Wareing, 2007: 63).

Pernyataan dari Orwell tersebut memberikan pemahaman mengenai penggunaan bahasa dikalangan politisi atau pemegang kekuasaan dalam membenarkan kebijakannya. Bahasa digunakan sebagai simbol untuk membenarkan perkara yang tidak benar atau dusta sehingga dikatakan sebagai perkara yang benar. Bahasa politik sebagai alat mempertahankan kekuasaan dikonstruksikan dengan cara kedustaan. Dusta melalui eksploitasi simbol kebahasaan ini dijadikan sarana yang ampuh untuk melanggengkan dan mempertahankan kekuasaan. Bahkan dalam pernyataan di atas disebutkan bahwa bahasa yang dirancang dusta pun bisa dikatakan sebagai sesuatu yang benar. Ironis lagi pembunuhan dalam pandangan Orwell melalui sudut bahasa dan kekuasaan bisa dipandang sebagai sesuatu yang terdengar mulia. Hal ini menandakan bahasa sebagai simbol kekuasaan dapat digunakan sebagai cara untuk melegitimasi persoalan salah menjadi perkara yang sah dan dibenarkan. Sehingga kekuasaan dapat terus berjalan sebagaimana harapan dari kaum dominan (politisi dan penguasa)

dalam struktur sosial.

Penggunaan bahasa sebagai simbolisasi mempertahankan kekuasaan secara sadar digunakan oleh para penguasa, cendikia, atau bangsawan guna menunjukkan pengakuannya dalam dominasi kelas sosial. Dominasi ini ditunjukkan melalui status yang dikonstruksi melalui simbol kebahasaan. Tidak hanya itu dengan bahasa, para politisi menggunakannya untuk melegitimasi berbagai kepentingan kekuasaan. Upaya inilah yang kemudian memberikan pemahaman bagi peneliti bahwa ada relasi atas penggunaan bahasa dengan simbol kekuasaan. Semua bertujuan membentuk dan mempertahankan kekuasaan.

Adanya relasi atas penggunaan bahasa dengan simbol kekuasaan juga dipertegas oleh Richard Jenkins dalam bukunya yang berjudul “Bahasa Masyarakat dan Kekuasaan” yang mengutip pernyataan Pierre Bourdieu sebagai berikut:

“Relasi kebahasaan selalu merupakan relasi kekuasaan sehingga tidak dapat dijelaskan dalam konteks analisis linguistik saja. Bahkan pertukaran linguistik paling sederhana dimainkan dalam jaring relasi kekuasaan historis yang kompleks dan menjerat yang melibatkan penutur, yang didukung oleh otoritas sosial, dan audiens, yang mengakui otoritas tersebut dengan berbagai derajat, maupun antara kelompok dimana mereka menjadi bagian darinya” (dalam Jenkins, 2010: 238).

Pernyataan dari Bourdieu tersebut merupakan pemahaman mengenai kebahasaan yang merupakan relasi kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem kebahasaan dalam struktur sosial mengandung rangkaian/ hubungan kekuasaan yang tidak dapat dipisahkan. Lebih lanjut jika peneliti melihat dari proses pembentukan bangsa, khususnya bahasa dalam strata sosial suku Jawa misalnya. Proses pembentukan bahasa tersebut menghasilkan pasar-pasar linguistik yang menyatu, dimana harga dan keuntungan pertemuan antara produksi dan penerimaan. Konteks ini menurut peneliti merupakan arti dari perbedaan sosial, khususnya perbedaan status sosial antara kaum bangsawan, dengan rakyat biasa. Bahasa berdampak besar dalam arena ini, bahasa legitimasi dominan merupakan modal yang memproduksi nalar kehormatan bagi penutur. Seperti penjelasan mengenai bahasa sopan dalam suku Jawa merupakan modal bagi kaum *priyayi* atau bangsawan dalam memproduksi nalar kehormatan. Sehingga bahasa sopan dimaknai sebagai bahasa kaum bangsawan, kaum cendikia yang memegang tampu kekuasaan dalam status legitimasi dalam

tatanan sosial suku Jawa. Semakin orang menggunakan bahasa sopan dalam dialektiknya menandakan ia sebagai cendikia ataupun penguasa yang mempunyai kekuasaan pada masa lalu.

Pertanyaan yang muncul dari perspektif di atas adalah, bagaimana bahasa sebagai simbol kekuasaan dimanfaatkan penguasa untuk mempertahankan kekuasaan pada era saat ini. Pemanfaatan ini tentunya dapat peneliti sampaikan mengenai bahasa politisi sebagaimana telah dipaparkan di atas. Politisi menggunakan bahasa untuk melegitimasi dan melakukan pembenaran atas kesalahan menjadi sesuatu yang patut diapresiasi karena kemuliaannya. Penguasapun juga menggunakan bahasa sebagai simbol mempertahankan kekuasaan.

Salah satu contoh adalah penggunaan pronominan atau kata ganti yang digunakan untuk menyelamatkan pembicara. Menyebutkan pandangan politik untuk menyembunyikan orang atau penguasa yang melakukan tindakan tertentu. Misalnya kebijakan berperang melawan teroris atau melawan penjajah yang banyak menelan korban dan biaya. Analogi mengenai penggunaan pronominan ini dapat peneliti sampaikan dari contoh kasus yang dipaparkan oleh Linda Thomas dan Shan Wareing dalam bukunya “Bahasa, Masyarakat dan kekuasaan. Dalam paparannya kedua penulis itu memberikan analogi mengenai perubahan kata “kami” menjadi “saya” dalam ucapan Presiden Bush berkaitan dengan aksi militer yang dilakukan tentara Amerika atas sejinnya. Bush dalam pernyataannya sebagaimana dikutip Linda Thomas dan Shan Wareing sebagai berikut:

“Seperti yang sudah kami umumkan kemarin malam, kami tidak akan menyerang prajurit tanpa senjata yang sedang bergerak mundur. Kami tidak punya pilihan lain kecuali menganggap unit tempur yang sedang mundur sebagai ancaman sehingga kami bertindak sesuai dengan situasi...(Bush ingin menegaskan bahwa unit yang diserang tentara AS itu bersenjata. Sejak awal dari operasi udara, hampir 6 minggu yang lalu, saya sudah mengatakan bahwa upaya kami telah berjalan sesuai dengan jadwal. Pagi ini dengan senang hati saya umumkan bahwa operasi yang dijalankan koalisi telah lebih awal dari jadwal. Kuwait akan bebas tidak lama lagi” (dalam Thomas & Wareing, 2007: 75).

Jika dilihat secara mendalam penggunaan kata “kami” dan “saya” merupakan strategi kebahasaan. Peneliti berasumsi bahwa Presiden Bush menggunakan

an dua kata ini dalam menanggapi invasi di Kuwait merupakan bagian dari strategi penguatan kekuasaan. Bahasa secara sadar digunakan oleh Bush sebagai upaya untuk membenarkan tindakan dan menegaskan kiprahnya dalam menyelesaikan konflik di Kuwait. Sehingga kata “kami” menurut asumsi peneliti digunakan untuk menyelamatkan Bush dari tuduhan kejahatan perang. Sehingga kata “kami” digunakan untuk membuat persepsi bahwa penyerangan bagi pemberontak adalah keputusan bersama. Setidaknya “kami” berisi makna tidak hanya satu orang, melainkan beberapa orang yang setuju akan serangan terhadap pasukan pemberontak yang mundur. Dengan dalih persenjataan yang dimiliki prajurit yang mundur dari peperangan, Bush melegalkan penyerangan tersebut. Walaupun tidak secara langsung penggunaan bahasa “kami”, ia ingin menyelamatkan dirinya atas kejahatan perang. Seolah-olah Bush ingin menegaskan bahwa tidak hanya dirinya yang berperan besar terhadap pengambilan keputusan atas penyerangan tersebut.

Sedangkan kata “saya” digunakan sebagai simbol untuk menekankan bahwa dirinya sendiri sebagai pihak yang menyebabkan pencapaian positif itu. Hal ini memberikan pemahaman bagi peneliti bahwa kekuasaan dan bahasa mempunyai relasi yang sangat kuat. Bahasa digunakan oleh kaum yang mendominasi parlemen atau politik untuk melakukan pembenaran dan pencitraan. Pembenaran disini berkaitan dengan penggunaan bahasa sebagai alat untuk mengaburkan persoalan atau mengubah persepsi yang salah bisa menjadi benar. Bisa jadi pasukan yang mundur itu sudah tidak membawa senjata, sehingga tidak patut jika penyerangan dilakukan tanpa menyebutkan alasan yang realistis. Walaupun akhirnya Bush mempertahankan kebijakannya atas dasar kalimat “kami” sebagai upaya melakukan pembenaran. Bahwa keputusan diambil atas dasar kesepakatan beberapa pihak. Paling tidak ini bisa mengamankan Bush dari tuduhan kejahatan perang. Kata saya juga berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk memperkuat kekuasaan melalui publikasian capaian positif dari pasukan yang diterjunkan. Seolah-olah capaian ini dapat diraih karena kecerdasan pemimpin dalam menentukan sikapnya terhadap tindakan invasi di lapangan. Sehingga masyarakat semakin simpati dan membenarkan tindakan tersebut, dalam artian kekuasaan akan mendapat dukungan dari publik.

Penggunaan bahasa sebagai simbol mempertahankan kekuasaan dalam konteks Indonesia dapat dicermati dari pidato resmi presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menanggapi persoalan

Bank Century. Diawal kekuasaan SBY tahun 2009 sesungguhnya kasus ini sudah menjadi perdebatan yang cukup keras di tingkat legislatif. Perbedaan pendapat mengenai penyelamatan Bank Century kemudian menjadi isu nasional. Hingga puncaknya pada tahun 2010 isu Century menjadi isu nasional yang kuat. Hak angket yang justru dimotori partai pendukung pemerintah yaitu Partai Golkar, PKS didukung oleh oposisi membuat stabilitas politik kala itu memanas. Isu-isu mengenai Bank Century, pejabat yang berwenang dalam pengambilan kebijakan tersebut diarahkan pada orang kepercayaan SBY yaitu Sri Mulyani Indrawati dan Boediono. Kedua tokoh penting ini menjadi bidikan utama dalam kasus tersebut. Seiring berjalannya waktu, isu ini merembet pada penggunaan dana talangan Bank Century untuk partai tertentu yang mengarah pada kekuasaan SBY. Sebagai seorang pemimpin pemerintahan tertinggi, tentu SBY tidak menginginkan kekuasaannya dirongrong. Kalkulasi politik menjadi hal yang diperhatikan SBY, sehingga pada tanggal 4 Maret 2010 SBY mengemukakan tanggapan resminya terkait persoalan Bank Century sebagai berikut:

“Hasil penyelidikan itu juga mengesampingkan suatu tuduhan bahwa seolah-olah penyelamatan Bank Century merupakan kedok semata untuk mengalirkan uang kepada partai tertentu dan sejumlah nama lainnya. Semua itu juga nyata-nyata tidak terbukti dan memang tidak pernah ada. Hal ini perlu dinyatakan secara tegas dan nyaring, agar tidak siapapun dari kita, apapun latar belakang politik dan asal partainya boleh dibiarkan mendapatkan penistaan karena nama baiknya dicemarkan secara sewenang-wenang dengan maksud dan niat politik yang buruk”. ([http://www.youtube.com/results?search\\_query=Liputan6+SCTV+pidato+SBY+Bank+Century+4+Maret+2010&oq=f&aqi=&aql=&gs\\_sm=s&gs\\_upl=605512818610132583137137101241216881382710.3.5.4.0.111310](http://www.youtube.com/results?search_query=Liputan6+SCTV+pidato+SBY+Bank+Century+4+Maret+2010&oq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=605512818610132583137137101241216881382710.3.5.4.0.111310), tanggal akses 20 Juni 2010 jam 18.25 WIB).

Berdasarkan kutipan di atas dapat penulis sampaikan bahwa, SBY sangat terganggu dengan beredarnya isu tersebut. Tuduhan beberapa pihak bahwa talangan Bank Century dimanfaatkan untuk kepentingan partainya menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian khusus. Jika isu ini melebar dan menjadi hal yang diyakini publik sebagai hal yang benar, maka kepercayaan publik kepada pemerintah akan turun.

Tentu SBY meyakini isu tersebut mendahului

proses hukum yang sedang berjalan. Seseorang atau lembaga tertentu sudah dihakimi tanpa memperhatikan kepastian hukum yang ada. Sehingga presiden perlu memberikan tanggapannya guna menanggulangi dampak terbesar dari isu terkait.

SBY tentu tidak ingin manufer politik yang beredar atas isu Bank Century membuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah turun. Satu-satunya jalan adalah mengklarifikasi duduk persoalan Bank Century yang sesungguhnya. Sehingga manufer politik yang tidak diinginkan dapat dianulir. Penegasan SBY bahwa tuduhan penyalahgunaan dana Century untuk partai tertentu nyata-nyata tidak benar. Jika diamati secara seksama SBY tidak menyebutkan secara gamblang siapa partai atau pihak yang difitnah. Hal ini mencegah kemungkinan besar munculnya manufer politik yang lain. Kenyataan inilah yang membuat kalimat berikutnya, SBY menegaskan bahwa tidak siapapun dari pihak manapun boleh dicemarkan dan dijatuhkan martabatnya dengan maksud dan iktikad politik yang buruk.

Pidato tersebut memperlihatkan bahwa SBY juga menggunakan pronominan atau kata ganti yang digunakan untuk menyelamatkan pembicaraan. Menyebutkan pandangan politik untuk menyembunyikan orang atau penguasa yang melakukan tindakan tertentu. SBY menggunakan kalimat partai-partai tertentu atau pihak-pihak lain. SBY tentu tidak ingin dirinya dinilai semata-mata melindungi partai atau orang terdekatnya dari tuduhan politik yang tidak benar adanya. Sehingga penilaian itu diserahkan kepada publik, siapa yang dimaksud SBY dalam serangkaian pidatonya.

Penulis juga perlu menambahkan penggunaan bahasa tubuh SBY dalam mengemukakan pidatonya terkait pembelaan terhadap partai ataupun pihak yang dijatuhkan dalam persoalan Bank Century. Pada dasarnya bahasa tubuh dan bahasa verbal tentu saling berkaitan dan membentuk satu konstruksi makna sosial. Sehingga dalam hal ini penulis perlu menampilkan gambar SBY terkait dengan pidato di atas sebagai berikut:

Gambar 1  
SBY berpidato



Sumber : ([http://www.youtube.com/results?search\\_query=Liputan6+SCTV+pidato+SBY+Bank+Century+4+Mar+et+2010&oq=f&aqi=&aql=&gs\\_sm=s&gs\\_upl=60551281861013258313713710124121216881382710.3.5.4.0.111310](http://www.youtube.com/results?search_query=Liputan6+SCTV+pidato+SBY+Bank+Century+4+Mar+et+2010&oq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=60551281861013258313713710124121216881382710.3.5.4.0.111310), tanggal akses 20 Juni 2010 jam 18.25 WIB).

Mencondongkan tubuh ke depan menandakan “bahasa tubuh orang yang berpikir positif”. Sedangkan mendongakkan kepala sedikit ke atas dapat dimaknai melui penelusuran makna bahasa tubuh yang dkemukakan oleh Horriyah dalam bukunya “cara mudah membaca pikiran dari tafsir bahasa tubuh”. Ia mengartikan kepala mendongak ke atas mengandung makna sebagai berikut:

“Kepala mendongak ke atas mempunyai makna bahwa dirinya memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka adalah sosok yang sangat optimis terhadap segala hal. Mendongakkan kepala merupakan gerakan spontan dari rasa optimis yang tinggi. Isyarat ini seringkali disebut sebagai orang yang ingin menggapai impian di masa depan dengan penuh percaya diri” (Horriyah, 2010: 107).

Berdasarkan kutipan tersebut penulis menggarisbawahi bahwa sikap optimisme SBY ditunjukkan dengan kalimat bahwa tuduhan penggunaan dana Bank Century kepada pihak-pihak tertentu atau partai tertentu nyata-nyata tidak benar. Rasa optimisme yang ditunjukkan, bahwa ia tidak ingin partai yang dimaksud dalam pidato tersebut dihantam manufer politik yang tidak berdasar. Hal ini tentu ditunjukkan kepada mereka yang selama ini gencar menyerang SBY lewat pengadilan opini. Kegeraman inilah yang terlihat dari kutipan tersebut. Mengingat kekuasaannya baru berjalan satu tahun. Tentu SBY mempunyai kalkulasi politik, bahwa setgab tidak boleh pecah, namun konflik kepentingan politik dapat dikendalikan. Sehingga tidak bergerak seperti bola liar.

Penggunaan bahasa visual yang tampak dari SBY dalam mengukuhkan kekuasaannya adalah melalui bahasa mata. Pandangan menyipitkan mata oleh SBY dalam pidatonya dapat diartikan melalui pemahaman terhadap bahasa tubuh. Adapaun pemahaman bahasa menyipitkan mata tersebut dapat dilihat dari buku “pintar memahami bahasa tubuh” karya James Borg. Ia mengartikan gerakan mata menyipit sebagai “isyarat penolakan atas sesuatu atau isyarat dominasi” (Borg, 2009: 121).

Jika hal tersebut dihubungkan dengan skandal persoalan Bank Century. Sesungguhnya isyarat

tersebut menunjukkan bahwa SBY menolak tindakan pengadilan opini sesat yang dilancarkan oleh pihak yang bersebrangan dengan SBY. Tentu penolakan itu sangat berdasar mengingat ia tidak mau harga diri pihak yang dimaksud dihakimi secara sepihak tanpa bukti hukum yang benar. Disamping memang adanya kalkulasi kepentingan politik yang harus diperhatikan secara seksama yaitu kekuasaan.

Bagian lain yang tampak dari pemanfaatan bahasa sebagai simbol kekuasaan terlihat dari senyum agresif presiden SBY. Senyum agresif adalah “bibir ditarik tepat ke belakang dan gigi diperlihatkan”. Menurut Judi James ini diartikan sebagai “senyum yang mematikan, memperlihatkan kegarangan” (James, 2010: 2009).

SBY dalam hal ini terlihat sangat marah sehingga diungkapkan dalam kalimat tersebut,” hal ini perlu dinyatakan secara tegas dan nyaring, agar tidak siapapun dari kita apapun latar belakang politik dan asal partainya boleh dibiarkan mendapatkan penistaan karena nama baiknya dicemarkan secara sewenang-wenang dengan maksud dan niat politik yang buruk”. Kegarangan ini tentu berdasar mengingat secara hukum pihak yang dituduh atas persoalan tersebut belum terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun pihak-pihak penunggang kepentingan sudah memastikan keterlibatan partai atau pihak lain yang dimaksud SBY dalam kasus tersebut.

Jika dirunut pada catatan sejarah masa lalu sesungguhnya dapat ditemukan berbagai catatan yang mendukung hal ini. Terkait dengan penggunaan bahasa tubuh dalam mempertahankan kekuasaan. Utamanya dari penggunaan bahasa tubuh para raja Jawa pada saat menghadapi situasi pelik dalam kekuasaannya.

Dijelaskan di dalam perjalanan dinamika adat keraton bahwa terdapat bahasa tubuh atau tingkah laku yang menggambarkan kebesaran raja dibandingkan para pengikutnya. Gerak tubuh biasanya akan dilakukan raja ketika mempersilakan sesuatu atau mengizinkan sesuatu hal. Hal ini dapat diamati dari paparan yang dikemukakan Raffles sebagai berikut:

“Di Keraton Surakarta, saya mencatat pertama kali ketika sedang mengadakan pertemuan pribadi dengan Susuhunan di tempat tinggalnya. Menjadi penting bagi Raden Adipati untuk dikirim ke keraton sebagai tanda kerajaan. Orang yang disuruh menjemput biasanya berjongkok, dan ketika Srisusuhunan duduk dengan wajah menghadapkan wajah ke pintu selama sepuluh menit, orang tersebut mendapatkan kesempatan untuk

cukup tegak meraih palang pintu tanpa terlihat oleh rajanya. Tugas yang diberikannya padanya cukup penting dan Srisusuhunan tidak menyukai penundaan” (Raffles, 2008: 210).

Berdasarkan catatan yang dikemukakan Raffles tersebut maka peneliti dapat menjelaskan bahwa isyarat menghadapkan wajah dengan sedikit mendongak ke atas mempunyai makna yang cukup penting. Sebagaimana dilakukan oleh Susuhunan dalam memberikan mandat kepada abadinya untuk ditugaskan menjemput Adipati sebagai utusan kerajaan. Ketika utusan datang dengan posisi tubuh dodok atau jongkok, kemudian susuhunan menghadapkan wajahnya ke pintu selama sepuluh menit, abadinya baru cukup tegak untuk meraih palang pintu tanpa terlihat rajanya. Berdasarkan hal di atas, tindakan itu merupakan mandat mempersilahkan tugas penting, yaitu menjemput Adipati sebagai utusan kerajaan. Menurut peneliti jika abdi dalem sebagai utusan mandat sampai bisa agak tegak meraih palang pintu tanpa terlihat raja. Berrarti posisi wajah raja agak diangkat atau mendongak menatap ke atas pintu sehingga abdi tidak terlihat.

Perspektif yang lain mengenai makna dari mendongakkan kepala juga dijelaskan dalam buku yang berjudul *Serat Centhini* yang dituliskan oleh Djoko Dwiyanto M.Hum. Ajaran yang termaktub didalamnya memuat kisah tentang kehidupan politik, sosial dan komunikasi raja Jawa dimasa itu. Penjelasan mengenai makna mendongakkan kepala dapat dilihat dari perjalanan politik Raja Giri Kedhaton yaitu Sunan Giri dalam menyambut utusan Panembahan Senopati Mataram. Pada masa itu Sultan Agung Mataram mengirimkan duta utusan yaitu Pangeran Surabaya untuk Giri Kedhaton agar bergabung dan tunduk pada kekuasaan Mataram. Namun hal ini ditolak oleh Sunan Giri dengan nada pembicaraan dan sikap tubuh sebagaimana berikut:

“Kanjeng Sunan Giri mendongakkan kepala seraya berkata dengan sopan, “Ya wallahualam, Allah SWT yang mengetahui, hanya akan menyerah kepada Tuhan”. Pangeran Surabaya ketika mendengar jawaban Kanjeng Sunan Giri segera pergi meninggalkannya. Sesudah Pangeran Surabaya pulang mereka bersepakat hendak berperang dan bersiap siaga keesokan paginya. Kyai Endro Seno menjadi panglima perang. Perintah Kanjeng Sunan Giri kepada para sahabat, murid, khatib dan muadzin sudah tersiar merata, para pasukan Giri sudah bersiap siaga” (Dwiyanto, 2008: 17).

Berdasarkan gambaran cerita yang termaktub

dalam ajaran *Centhini* di atas, peneliti juga berasumsi bahwa sikap mendongakkan kepala juga melambangkan keberanian dan sebuah penolakan. Hal ini terlihat dari keberanian Sunan Giri menolak ajakan dari Mataram untuk bergabung. Ditegaskan dengan kalimat hanya akan menyerah kepada Tuhan, berarti menunjukkan keyakinan kuat Sunan Giri yang tidak akan menyerah kepada siapapun kecuali Allah. Posisi mendongakkan kepala yang disertai kalimat seperti itu tentunya mempertegas sikap keberanian dan menunjukkan sikap penolakan atas dominasi Mataram terhadap Giri Kedhaton. Inilah yang kemudian memberikan inspirasi bagi peneliti bahwa mendongakkan kepala juga lekat akan makna keberanian dan sebuah penolakan yang menunjukkan kewibawaan sebagai raja Giri. Hal ini memberikan pemahaman bagi peneliti bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh Presiden SBY dalam menanggapi desakan publik atas persoalan Bank Century.

## Penutup

### Simpulan

Bahasa sebagai simbol mempertahankan kekuasaan telah ada dan digunakan oleh para penguasa dimasa lalu. Melalui bahasa seseorang dapat menciptakan sebuah dominasi kekuasaan. Sebagaimana simbol kekuasaan yang ada sejak zaman kerajaan Jawa. Bahasa sopan hanya digunakan oleh mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dalam struktur sosial masyarakat. Sehingga ini menunjukkan betapa bahasa dikonstruksi dan digunakan oleh para elit sosial waktu itu untuk memisahkan strata sosial yang telah ada. Tidak hanya itu, catatan sejarah tersebut memberikan pemahaman bahwa aturan main dalam penggunaan bahasapun sudah ada pada waktu itu. Masing-masing strata sosial memiliki cara sendiri dalam menggunakan bahasa dialektiknya.

Tidak hanya digunakan oleh raja pada masa terdahulu saja. Bahasa sebagai simbol mempertahankan kekuasaan juga digunakan oleh para aktor politik atau pemimpin negara. Sebagaimana yang dilakukan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika dihadapkan pada persoalan Bank Century. SBY merasa terganggu dengan pengadilan opini sesat yang disampaikan melalui banyak aspek. Ketika pengadilan opini tersebut sudah bergerak menuju kearah partai tertentu yang sangat getol mendukung presiden. Tentu presiden mewaspadaai kemungkinan kehilangan kepercayaan dari publik dan perpecahan pada koalisi gabungan partai. Penggunaan bahasa dalam rangka

mempertahankan kekuasaan dipandang sebagai cara yang efektif. Pidato 4 Maret 2010 adalah momentum tepat dalam rangka mengklarifikasi duduk persoalan Bank Century yang sesungguhnya. Penggunaan pro-nominan dan bahasa tubuh menjadi cara yang tepat dalam mengamankan kekuasaan. Meskipun dalam kesempatan tersebut SBY lebih menggunakan bahasa bersayap dan cenderung menyerahkan penilaian kepada publik bahwa ada pengadilan opini sesat yang ditujukan pada pihak yang dimaksudnya. Sehingga peran bahasa sebagai simbol kekuasaan benar benar menjadi sarana penting dalam mempertahankan kekuasaan atau membentuk sebuah kekuasaan.

Begitu juga yang terjadi pada penggunaan bahasa pidato Presiden Bush dalam meyakinkan publik akan tujuan agresi militer atas Kuwait. Penggunaan simbolisasi bahasa untuk memberikan pemahaman atas keberlangsungan tindakan yang harus segera dilakukan demi pembebasan Kuwait dari krisis yang ada. Sehingga hal ini sesungguhnya menutup kemungkinan diambilnya kebijakan yang lain selain peperangan. Inilah yang sesungguhnya dapat dilihat dari peran simbol bahasa dalam mempertahankan, mendominasi sebuah kekuasaan. Asalkan hal tersebut sesuai dengan tujuan yang diinginkan penguasa maka konstruksi bahasa yang dikemukakanpun akan bertendensi kuat atas konflik kepentingan.

### Saran

Artikel ini sesungguhnya memaparkan bentuk penggunaan bahasa sebagai simbol mempertahankan kekuasaan. Namun demikian artikel ini perlu penambahan peran kajian yang lain seperti dramaturgi untuk mengetahui secara lebih mendalam motif kekuasaan. Adapun ulasan artikel ini penulis ambil dari catatan perkembangan sejarah masa lalu. Sehingga mempunyai keterbatasan pada kasus penggunaan bahasa sebagai simbol mempertahankan kekuasaan pada tahun-tahun ini. Akan lebih mempunyai nilai edukasi yang lebih baik jika ditambahkan ulasan bahasa yang digunakan pemimpin-pemimpin sekarang dalam mempertahankan kekuasaan.

### Daftar Pustaka

- Borg, James.(2009). *Memahami Bahasa Tubuh*. Yogyakarta: Think.
- Dwiyanto, Djoko.(2008). *Ensiklopedi Serat Centhini*. Yogyakarta: Panji Pustaka
- Horriyah.(2010). *Cara Mudah Membaca Pikiran Orang Dari Tafsir Bahasa Tubuhnya*. Yogyakarta:

ta: FlashBook.

James, Judi.(2008). *The Body language*. Jakarta: Ufuk Pers.

Jenkins, Richard.(2010). *Membaca Pemikiran Bourdieu*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Noorsalim, Mashudi dan Widjojo, Muridan S.(2004). *Bahasa Negara Versus Bahasa Gerakan Mahasiswa*. Jakarta: Lippi Press.

Thomas, Linda dan Wareing Shang.(2007). *Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Montefiore, Simon S.(2008). *Pidato-pidato yang Mengubah Dunia*. Jakarta: Esensi.

Raffles, Stamford T.(2008). *The History of Java*. Yogyakarta: Narasi.

### Internet

([http://www.youtube.com/results?search\\_query=Liputan6+SCTV+pidato+SBY+Bank+Century+4+Maret+2010&oq=f&aqi=&aql=&gs\\_sm=s&gs\\_upl=60551281861013258313713710124121216881382710.3.5.4.0.111310](http://www.youtube.com/results?search_query=Liputan6+SCTV+pidato+SBY+Bank+Century+4+Maret+2010&oq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=60551281861013258313713710124121216881382710.3.5.4.0.111310), tanggal akses 20 Juni 2010 jam 18.25 WIB).